

**KEBIJAKAN APLIKATIF DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DI PENGADILAN MILITER**

**VERA YANTI**

**ABSTRAK**

Penyelesaian perkara pidana militer tidak dapat diliput oleh media massa dan tidak dapat disaksikan oleh masyarakat umum. Tetapi berdasarkan hukumnya peradilan militer sebenarnya sama dengan peradilan umum, yakni menggunakan asas terbuka untuk umum yang dipertegas dalam Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi: “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan dinyatakan tertutup untuk umum”. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk menggambarkan pengaturan yurisdiksi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. 2. Untuk menganalisis proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI dan 3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Pengaturan yurisdiksi badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh: 1) militer; 2) berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan militer; 3) anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai militer 4) seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas; 5) sengketa Tata Usaha Militer; 6) menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana 7) sengketa kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Militer; 8) memutus pada tingkat pertama dan terakhir perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur. Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI dalam lingkup peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, yang mana dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, serta tahap putusan/eksekusi. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI sebagai berikut: a. penegakan hukum dalam organisasi TNI, b. peningkatan profesionalisme prajurit TNI c. meningkatkan kepatuhan terhadap norma Prajurit TNI d. peningkatan kinerja aparat penegak hukum TNI.

Kata Kunci :Pidana, Penyelesaian, TNI

**COMPLETION OF CRIMINAL CASES PERFORMED BY TNI  
MEMBERS BASED ON LAW NUMBER 31 YEAR 1997  
ABOUT MILITARY JUSTICE**

**VERA YANTI**

**ABSTRACT**

*The settlement of military criminal matters can not be covered by mass media and can not be witnessed by the general public. But under the law the military justice is in fact the same as the general justice, which is to use the open-ended principle of public under Article 141 paragraph (2) of Act Number 31 of 1997 which reads: "For inspection purposes, the Chief Justice opened a hearing and declared an open trial for General, except in the case of morality declared publicly ". The purpose of this study is as follows: a. To illustrate the jurisdiction of military jurisdiction as the executor of judicial power. 2. To analyze the process of criminal case settlements committed by TNI members and 3. To analyze what efforts can be taken to combat the offenses committed by TNI members. With a juridical normative research method with a case study thesis it is known that the jurisdiction setting of judicial bodies within the Military Justice environment is carried out by: 1) the military; 2) based on the law is parallel with the military; 3) a member of a class or position or body or of being ordained or regarded as a military 4) a person included in the case of connection; 5) Military Administrative dispute; 6) combine litigation claims in criminal matters 7) dispute over judicial authority within Military Courts; 8) decide on the first and final levels of disagreement between Article Substitute Officer (Papera) and Oditur. The settlement of criminal cases committed by TNI members in the military jurisdiction is the same as the criminal justice process in the scope of the general justice, which begins from the stage of investigation and investigation, prosecution stage, trial stage in the trial, and decision / execution stage. Efforts to Combat Crimes Conducted by TNI Members are as follows: a. Law enforcement in TNI organization, b. Increase of TNI soldiers' professionalism c. Increase compliance with the norms of the TNI Warrior d. Improving the performance of TNI law enforcement officers.*

**Keywords** : Criminal, Settlement, TNI